

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN MELALUI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 14 TAHUN 2018 DI KOTA BANDUNG

Waris Ari Nugroho¹

Agus Subagyo²

Danny Permana³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi :

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of urban settlement management policies through the Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Program in Bandung City. The program represents the Indonesian government's national initiative to improve urban slum areas by increasing access to basic infrastructure and community-based participation. The research employed a qualitative descriptive method, with data obtained through in-depth interviews, observation, and documentation involving government officials and residents in slum areas. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the effectiveness of the Kotaku Program implementation in Bandung City has not been fully optimal. Limited community participation, insufficient socialization, and weak coordination among local actors have reduced the program's impact. However, the program succeeded in improving access to clean water, road infrastructure, and sanitation in several locations. The study concludes that the effectiveness of the Kotaku Program requires stronger collaboration between the government, private sector, and society, along with improved innovation in local implementation strategies.

Keywords: Effectiveness, Public Policy, Urban Settlement, Kotaku Program, Bandung City.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dalam konteks tersebut, pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan permukiman menjadi salah satu aspek fundamental karena berfungsi sebagai penggerak

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup warga negara. Pembangunan yang terarah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik kota, tetapi juga pada peningkatan kualitas ruang hidup masyarakat, khususnya dalam penyediaan hunian yang layak dan lingkungan yang sehat. Namun, dalam realitasnya, kesenjangan antara pertumbuhan fisik dan kemampuan tata kelola perkotaan masih menjadi persoalan yang serius di berbagai kota besar di Indonesia.

Salah satu isu mendasar yang mengemuka dalam dinamika pembangunan perkotaan adalah meningkatnya kawasan permukiman kumuh (slum area). Berdasarkan data Direktorat Pengawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, luas kawasan kumuh di Indonesia meningkat dari sekitar 38.000 hektar pada tahun 2014 menjadi 87.000 hektar pada tahun 2019. Fenomena ini menunjukkan bahwa urbanisasi yang tinggi tidak diimbangi oleh penyediaan hunian yang layak, infrastruktur dasar yang memadai, dan sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Permukiman kumuh menjadi cerminan ketimpangan sosial dan lemahnya tata kelola ruang yang berkeadilan. Kawasan permukiman kumuh memiliki karakteristik yang kompleks. Umumnya ditandai oleh ketidakteraturan bangunan, kepadatan penduduk yang tinggi, rendahnya kualitas sarana prasarana lingkungan, serta lemahnya status hukum lahan

Kota Bandung, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat dan salah satu pusat kegiatan nasional (PKN), tidak luput dari permasalahan ini. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi yang masif mendorong terjadinya tekanan terhadap lahan permukiman, yang pada akhirnya melahirkan kantong-kantong permukiman kumuh di berbagai wilayah kota. Berdasarkan hasil identifikasi, kawasan kumuh di Kota Bandung tersebar di 30 kelurahan dengan berbagai tingkat keparahan, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan lahan, ketimpangan akses terhadap infrastruktur dasar, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan huninya.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Dalam menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meluncurkan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sebagai salah satu program strategis nasional. Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan permukiman di kawasan kumuh perkotaan, guna mewujudkan lingkungan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Program ini juga merupakan tindak lanjut dari National Slum Upgrading Program (NUSP-2) yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan pendekatan berbasis komunitas (community-based development), Kotaku diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam menata dan mencegah munculnya kawasan kumuh baru.

Secara normatif, pelaksanaan Program Kotaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Regulasi ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, kolaborasi lintas sektor, serta keberlanjutan hasil pembangunan. Namun, dalam tataran implementasi, berbagai kendala masih muncul. Di Kota Bandung misalnya, efektivitas pelaksanaan program ini belum sepenuhnya optimal karena lemahnya koordinasi antar instansi, minimnya inovasi sosial di tingkat kelurahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan permukiman.

Kelemahan tersebut berdampak langsung terhadap capaian program. Hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan belum merata, banyak masyarakat yang belum memahami substansi dan manfaat program, serta terdapat ketimpangan dalam pemerataan pembangunan antarwilayah. Selain itu, efektivitas kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor adaptasi terhadap lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Di beberapa kawasan, kondisi sosial ekonomi warga yang rendah menghambat upaya perawatan infrastruktur dan penerapan perilaku hidup bersih. Sementara itu, di sisi kelembagaan, koordinasi antar-OPD seperti Dinas Perumahan dan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Kawasan Permukiman serta Dinas Pekerjaan Umum masih belum terintegrasi dengan baik, sehingga pelaksanaan kebijakan seringkali berjalan sektoral dan tidak berkelanjutan. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan di tingkat nasional dengan realitas implementasi di tingkat lokal.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dirumuskan permasalahan utama penelitian ini, yaitu: Bagaimana efektivitas kebijakan penataan kawasan permukiman melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Bandung? Rumusan ini mencakup beberapa aspek turunan: sejauh mana sosialisasi program berjalan efektif, bagaimana tingkat pemahaman aktor pelaksana dan masyarakat terhadap kebijakan, serta bagaimana perubahan nyata yang terjadi di kawasan sasaran setelah implementasi program dilakukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan penataan kawasan permukiman melalui Program Kotaku di Kota Bandung, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk peningkatan kualitas implementasi program. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik kebijakan penataan kawasan permukiman berbasis masyarakat di tingkat daerah.

Secara akademis, penelitian ini penting karena memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu kebijakan publik dan tata kelola perkotaan, khususnya dalam konteks efektivitas implementasi kebijakan berbasis kolaborasi multi-aktor. Sementara secara praktis, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi bagi Pemerintah Kota Bandung dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi penanganan kawasan kumuh yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat lokal, serta sebagai model bagi daerah lain dalam mengimplementasikan Program Kota Tanpa Kumuh secara efektif.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Kerangka Teori

Dalam konteks penataan kawasan permukiman, efektivitas kebijakan mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program secara tepat sasaran, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), penelitian ini menggunakan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani (dalam Pradipta & Hariani, 2017). Teori ini menilai efektivitas berdasarkan lima dimensi utama, yaitu: (1) Sosialisasi Program, (2) Pemahaman Program, (3) Tujuan Program, (4) Bentuk Perubahan Nyata, dan (5) Sistem Pengawasan dan Pengendalian.

Kelima dimensi tersebut dianggap paling relevan untuk menilai efektivitas kebijakan publik yang bersifat partisipatif dan berbasis komunitas, seperti halnya Program Kotaku, yang menuntut keterlibatan aktif berbagai aktor—pemerintah, masyarakat, dan swasta—dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil pembangunan.

1. Sosialisasi Program

Sosialisasi merupakan tahap awal yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Melalui sosialisasi, pemerintah berupaya menyampaikan tujuan, sasaran, mekanisme, serta manfaat dari program kepada masyarakat penerima manfaat. Menurut Budiani, efektivitas program sangat bergantung pada sejauh mana informasi kebijakan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat sebagai dasar partisipasi mereka dalam implementasi program.

2) Pemahaman Program

Dimensi kedua dari teori Budiani menekankan bahwa efektivitas kebijakan tidak dapat tercapai tanpa adanya pemahaman yang baik dari seluruh aktor pelaksana maupun penerima manfaat. Pemahaman mencakup sejauh mana masyarakat, aparat pelaksana, dan pemangku kepentingan memahami tujuan, mekanisme, dan substansi program secara menyeluruh.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

3) Tujuan Program

Dimensi ketiga berkaitan langsung dengan pencapaian hasil kebijakan (goal attainment). Suatu kebijakan publik dapat dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam tahap perencanaan. Budiani menegaskan bahwa ukuran efektivitas harus dikaitkan dengan keberhasilan program dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya pada penyelesaian kegiatan administratif.

4) Bentuk Perubahan Nyata

Dimensi keempat menilai sejauh mana kebijakan publik menghasilkan perubahan yang nyata dan terukur di lapangan. Perubahan nyata dapat bersifat fisik (misalnya peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan) maupun nonfisik (seperti perubahan perilaku, kesadaran kolektif, atau peningkatan kapasitas masyarakat).

5) Sistem Pengawasan dan Pengendalian.

Dimensi terakhir dalam teori Budiani adalah sistem pengawasan dan pengendalian. Dalam manajemen kebijakan publik, pengawasan merupakan instrumen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan regulasi yang berlaku. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, kebijakan rentan terhadap penyimpangan, inefisiensi, dan kehilangan fokus terhadap tujuan utamanya.

Berdasarkan uraian di atas, teori efektivitas Budiani (Pradipta & Hariani, 2017) memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan publik, khususnya yang bersifat community-based development. Kelima dimensi tersebut memiliki keterkaitan fungsional yang saling memperkuat antara sosialisasi membangun kesadaran, pemahaman menciptakan kompetensi pelaksana, pencapaian tujuan memastikan orientasi hasil, perubahan nyata merepresentasikan dampak sosial, dan pengawasan menjamin keberlanjutan kebijakan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas kebijakan penataan kawasan permukiman melalui Program *Kota Tanpa Kumuh* (Kotaku) di Kota Bandung. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kompleks, kontekstual, dan multidimensional, melibatkan interaksi antaraktor kebijakan, perilaku sosial masyarakat, serta dinamika implementasi program di tingkat lokal.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang secara administratif merupakan salah satu kota dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Indonesia. Kota ini memiliki pertumbuhan penduduk yang pesat dan tekanan yang signifikan terhadap lahan hunian, sehingga muncul berbagai kawasan permukiman kumuh yang menjadi sasaran utama Program Kotaku. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan para informan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka terkait pelaksanaan Program Kotaku.

PEMBAHASAN

Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat yang berperan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) dalam struktur ruang wilayah Indonesia. Secara geografis, kota ini terletak pada ketinggian 791 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 16.730 hektare, terbagi dalam 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Kota Bandung mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat dengan kepadatan mencapai lebih dari 13.000 jiwa per kilometer persegi, yang menyebabkan tekanan besar terhadap lahan permukiman. Kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya kawasan kumuh di berbagai wilayah, terutama di daerah padat penduduk seperti Bojongloa Kaler, Cibeunying Kidul, Antapani, dan Gedebage. Berdasarkan data Disperkim Kota Bandung, sedikitnya terdapat 30 kelurahan yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Dari aspek fisik, kawasan kumuh di Kota Bandung umumnya ditandai oleh ketidakteraturan bangunan, buruknya sanitasi lingkungan, kurangnya akses air bersih, serta kepadatan bangunan yang tinggi. Selain itu, banyak kawasan kumuh yang berdiri di lahan tidak sesuai peruntukan, seperti bantaran sungai dan jalur rel kereta api. Pemerintah Kota Bandung melalui Program Kotaku telah menetapkan target utama berupa peningkatan kualitas permukiman perkotaan untuk mewujudkan lingkungan layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Program ini mencakup kegiatan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, dan ruang terbuka hijau, serta pemberdayaan masyarakat melalui kelompok swadaya dan pemanfaat program.

Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bandung dijalankan sejak tahun 2016 sebagai kelanjutan dari program NUSP-2 (Neighborhood Upgrading and Shelter Project). Program ini menggunakan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap kelurahan sasaran diwajibkan menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) sebagai dokumen dasar pelaksanaan program berbasis masyarakat. Program ini mengacu pada tujuh aspek penilaian kualitas permukiman menurut Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018, yaitu: kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan pengamanan kebakaran.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kotaku telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar. Beberapa wilayah yang sebelumnya sering mengalami banjir kini memiliki drainase yang lebih baik, jalan lingkungan diperkeras, serta penyediaan air bersih melalui PDAM telah meningkat. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antarwilayah karena belum semua kawasan kumuh mendapatkan intervensi yang sama. Selain itu, partisipasi masyarakat masih terbatas, terutama dalam hal pemeliharaan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

sarana yang telah dibangun. Sejumlah warga mengakui bahwa setelah program selesai, sebagian fasilitas publik kembali mengalami kerusakan karena minimnya kesadaran dan lemahnya sistem pengawasan masyarakat

1) Dimensi Sosialisasi Program

Sosialisasi merupakan tahap awal yang menentukan efektivitas kebijakan publik. Dalam pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung, sosialisasi dinilai belum sepenuhnya optimal. Meskipun pemerintah telah melakukan kegiatan penyuluhan dan rapat koordinasi di tingkat kelurahan, penyampaian informasi masih bersifat terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Banyak warga yang mengetahui program hanya dari kegiatan pembangunan fisik tanpa memahami substansi dan tujuan jangka panjangnya. Minimnya keterlibatan perangkat RW, LPM, serta kelompok masyarakat dalam sosialisasi menyebabkan rendahnya rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil program. Hal ini berdampak langsung terhadap partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara hasil pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pada dimensi sosialisasi masih lemah, dan perlu strategi komunikasi publik yang lebih interaktif dan partisipatif.

2) Dimensi Pemahaman Program.

Efektivitas kebijakan juga ditentukan oleh tingkat pemahaman para aktor pelaksana dan penerima manfaat terhadap substansi program. Berdasarkan hasil wawancara, banyak masyarakat dan aparat di tingkat kelurahan yang belum memahami secara utuh mekanisme pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta tanggung jawab pascapembangunan. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan fisik sering kali dilakukan tanpa sinkronisasi dengan aspek pemberdayaan sosial. Pemahaman yang terbatas ini juga menyebabkan rendahnya inovasi lokal dalam mengelola hasil program. Misalnya, kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) yang dibentuk sering kali tidak menjalankan fungsinya secara optimal karena kurang memahami peran strategisnya dalam keberlanjutan program. Dengan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

demikian, dimensi pemahaman menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pendampingan berkelanjutan.

3) Dimensi Tujuan Program

Dari sisi pencapaian tujuan, Program Kotaku di Kota Bandung telah menunjukkan capaian positif, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan target yang direncanakan. Tujuan utama untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar dan menciptakan lingkungan layak huni telah tercapai sebagian, terutama pada aspek fisik seperti peningkatan jalan lingkungan, penyediaan hidran umum, dan drainase. Namun, tujuan non-fisik seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemandirian lokal belum sepenuhnya terwujud. Selain itu, pemerataan pembangunan masih menjadi isu penting, karena tidak semua kawasan kumuh mendapatkan porsi intervensi yang proporsional. Dengan demikian, efektivitas kebijakan dalam dimensi tujuan dapat dikategorikan “cukup efektif”, namun memerlukan optimalisasi pada aspek sosial dan kelembagaan.

4) Dimensi bentuk Nyata Perubahan

Perubahan nyata sebagai hasil dari implementasi kebijakan terlihat dari meningkatnya kualitas fisik permukiman dan menurunnya tingkat kekumuhan di beberapa wilayah Kota Bandung. Warga yang sebelumnya sering mengalami banjir dan genangan kini mulai merasakan perbaikan lingkungan. Namun, perubahan nonfisik seperti kesadaran menjaga kebersihan dan budaya partisipatif masyarakat masih perlu diperkuat. Fenomena yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa setelah infrastruktur dibangun, sebagian masyarakat kembali abai terhadap pemeliharaan karena menganggap tanggung jawab tersebut sepenuhnya milik pemerintah. Oleh karena itu, perubahan nyata yang dihasilkan kebijakan masih dominan pada aspek fisik, sedangkan dimensi sosial belum menunjukkan transformasi yang signifikan. Ini menandakan perlunya integrasi pendekatan sosial dalam kebijakan penataan kawasan permukiman.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

5) Dimensi Pengawasan dan Pengendalian

Dimensi terakhir berkaitan dengan sistem pengawasan dan pengendalian kebijakan. Berdasarkan temuan penelitian, mekanisme pengawasan pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung masih bersifat sektoral dan belum terkoordinasi dengan baik antarinstansi. Dinas teknis seperti Disperkim dan DPU cenderung berfokus pada pelaksanaan proyek fisik, sementara fungsi evaluasi dan monitoring pascaprogram belum berjalan secara efektif. Pengawasan berbasis masyarakat melalui kelompok pemanfaat dan pemelihara juga masih lemah karena minimnya dukungan dan pembinaan dari pemerintah daerah. Akibatnya, banyak hasil pembangunan yang tidak terpelihara dengan baik dan mengalami penurunan fungsi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian menjadi titik kritis dalam efektivitas kebijakan, yang perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berbasis komunitas.

Berdasarkan kelima dimensi teori Budiani, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan penataan kawasan permukiman melalui Program Kotaku di Kota Bandung masih tergolong moderat. Keberhasilan program lebih banyak tampak pada hasil fisik, sementara aspek sosial, partisipasi masyarakat, dan pengawasan belum berjalan optimal. Permasalahan utama terletak pada lemahnya komunikasi kebijakan, rendahnya kapasitas kelembagaan lokal, serta belum terbentuknya budaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif yang berkelanjutan dalam implementasi kebijakan publik di bidang permukiman, agar efektivitas program tidak hanya diukur dari hasil pembangunan, tetapi juga dari perubahan perilaku sosial dan keberlanjutan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas kebijakan penataan kawasan permukiman melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Bandung, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program ini secara umum berhasil memberikan dampak positif terhadap perbaikan infrastruktur dasar di kawasan kumuh, seperti peningkatan kualitas jalan lingkungan, drainase, serta penyediaan air bersih. Namun, efektivitas kebijakan masih terbatas karena belum terwujudnya sinergi yang optimal antara pemerintah daerah, aparat kelurahan, dan masyarakat penerima manfaat.

Dari hasil analisis lima dimensi teori Budiani (Pradipta & Hariani, 2017), ditemukan bahwa: (1) Sosialisasi program belum maksimal karena komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah masih bersifat formal dan kurang menjangkau masyarakat akar rumput; (2) Pemahaman aktor pelaksana dan masyarakat terhadap substansi program masih rendah, mengakibatkan ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan di lapangan; (3) Tujuan program telah tercapai sebagian besar pada aspek fisik, namun aspek sosial seperti pemberdayaan dan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan; (4) Bentuk perubahan nyata dari program lebih menonjol pada perbaikan lingkungan fisik, sedangkan perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan belum signifikan; dan (5) Sistem pengawasan dan pengendalian program belum terintegrasi dengan baik antarinstansi dan kelompok masyarakat, sehingga keberlanjutan hasil program belum terjamin secara optimal.

Dengan demikian, efektivitas kebijakan Program Kotaku di Kota Bandung dapat dikategorikan cukup efektif namun belum optimal. Faktor penghambat utama berasal dari lemahnya komunikasi kebijakan, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, serta kurangnya pengawasan dan pembinaan pascaprogram. Sementara itu, faktor pendukungnya adalah adanya komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas permukiman dan adanya kesadaran awal masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan penataan kawasan permukiman tidak hanya bergantung pada keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga pada transformasi sosial, koordinasi kelembagaan, dan keberlanjutan pengelolaan lingkungan secara partisipatif.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas Program *Kota Tanpa Kumuh* di Kota Bandung adalah sebagai berikut.

Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme sosialisasi program dengan menggunakan pendekatan komunikasi publik yang lebih partisipatif dan kontekstual. Sosialisasi tidak hanya disampaikan melalui pertemuan formal, tetapi juga melalui media lokal, forum warga, dan kegiatan edukatif berbasis komunitas agar pesan kebijakan dapat dipahami secara luas dan mendalam.

Kedua, penguatan kapasitas aparatur pelaksana dan masyarakat penerima manfaat perlu dilakukan melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan pembentukan kader lokal yang memahami prinsip-prinsip pemberdayaan dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini akan meningkatkan pemahaman terhadap substansi program dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam setiap tahap pelaksanaan kebijakan.

Ketiga, pemerintah Kota Bandung perlu menata ulang sistem koordinasi lintas sektor antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, PDAM, serta perangkat kelurahan, agar pelaksanaan program berjalan terpadu dan tidak bersifat sektoral. Kolaborasi lintas sektor juga perlu diperluas dengan melibatkan TNI, Polri, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan program.

Keempat, sistem pengawasan dan pengendalian pascaprogram harus diperkuat dengan mengembangkan model *community-based monitoring*, yaitu pelibatan langsung masyarakat dalam pemantauan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Pemerintah daerah perlu membentuk mekanisme evaluasi berkala yang transparan, berbasis data, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar keberlanjutan hasil program dapat terjamin.

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 17 Okt 2025

Published : 27 Okt 2025

Kelima, pembangunan sosial masyarakat perlu dijadikan prioritas dalam kebijakan penataan kawasan permukiman. Perubahan fisik lingkungan harus diikuti dengan perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi lingkungan, pengelolaan sampah berbasis rumah tangga, serta pembentukan kelompok swadaya masyarakat yang aktif. Upaya ini akan memastikan bahwa hasil program tidak hanya berumur jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan penataan kawasan permukiman bukan hanya diukur dari seberapa banyak infrastruktur yang dibangun, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengubah perilaku, memperkuat kelembagaan lokal, dan menciptakan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan dan efektivitas Program *Kota Tanpa Kumuh* di masa mendatang sangat bergantung pada transformasi paradigma kebijakan dari orientasi proyek menuju orientasi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

REFERENSI

- Asri, F., Rahmawati, D., & Sudarsono, T. (2014). *Karakteristik Lingkungan dan Perilaku Penghuni Permukiman Perkotaan*. Jakarta: UI Press.
- Budiani, S. (2017). *Efektivitas Program dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, W. N. (1998). *Public Policy Analysis: An Introduction* (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Hariyanto, & Tukidi. (2007). *Penataan Kawasan dan Tata Ruang Wilayah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kurniawan, A. (2005). *Efektivitas Organisasi Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 17 Okt 2025

Published : 27 Okt 2025

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moenir, H. A. S. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pradipta, R., & Hariani, E. (2017). *Analisis Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial*. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen Pemerintahan*, 4(2), 121–136.
- Silas, J. (1996). *Kawasan Permukiman dan Perkembangannya*. Surabaya: ITS Press.
- Steers, R. M. (1985). *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. Santa Monica, CA: Goodyear Publishing Company.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.